



RELASI GENDER PEREMPUAN DALAM TEKS LA GALIGO

Hasmawati SU¹, Ery Iswary², Prasuri Kuswarini³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin

History Article

Article history:

Received July 17, 2023

Approved August 27, 2023

Keywords:

Gender Relations, Women, Bugis, La Galigo

ABSTRACT

This research is qualitative, using the descriptive method. This study aims to analyze the gender relations of women in the La Galigo text based on NBG 188 Volume 3 using equilibrium theory. This study uses library research methods. The results of the research show that women's gender relations are developed equally, where women are not only involved and have a role in domestic affairs but also in the public. Things that are generally done by men are also done by women. For example, women can express opinions and make decisions regarding their household lives. Women are given the trust to do things that are usually done by men; even women can give orders as well as men.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi gender perempuan dalam teks La Galigo berdasarkan naskah NBG 188 Jilid 3 dengan menggunakan teori equilibrium. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi gender perempuan terbangun secara setara, dimana perempuan tidak hanya dilibatkan dan memiliki peran dalam urusan domestik, tetapi juga publik. Hal-hal yang umumnya dilakukan laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. Misalnya, perempuan bisa menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya. Perempuan diberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, bahkan perempuan juga

bisa memberikan perintah sebagaimana halnya dengan laki-laki.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: hasmawatisu45@gmail.com

PENDAHULUAN

Perempuan dengan segala hal yang melingkupi dirinya adalah sosok yang selalu menarik untuk dikaji. Khususnya perempuan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan sebuah bangsa besar yang terdiri atas suku yang jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam sehingga adat yang mengatur tatanan kehidupan perempuan di Indonesia jumlahnya juga menjadi sangat banyak dan beragam, mengikuti tradisi dan budaya dari suku dimana perempuan itu hidup.

Salah satu hal yang sangat berpengaruh bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya perempuan adalah sistem kekerabatan. Setiap suku yang ada di dunia memiliki sistem kekerabatan yang khas dan menciptakan perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya, tak terkecuali di Indonesia. Mahmud (dalam Suwarno, 2022) mengemukakan bahwasanya kekerabatan merupakan bentuk hubungan sosial yang timbul karena garis keturunan (*consanguinity*) serta perkawinan (*affinity*), sementara menurut Irawan (dalam Suwarno, 2022), sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam struktur sosial, yang didalamnya terdapat hubungan jaringan kompleks berdasar ikatan darah dan perkawinan.

Pada umumnya bentuk hubungan kekeluargaan yang terbangun antara laki-laki dan perempuan adalah *patrilineal* yang sifatnya sangat maskulin, dimana laki-lakilah yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan, sekaligus memegang jabatan dan posisi penting di dunia publik. Perempuan hanya ditempatkan sebagai makhluk sosial kedua yang hanya bisa di dalam rumah, sedangkan semua area publik dikuasai oleh laki-laki (Chaerunnisa, 2019).

Irawan (2010:73) mengungkapkan bahwa perempuan adalah entitas fisik, moral dan sosial yang selalu mendapatkan pembatasan dan pengucilan di wilayah privat apalagi publik. Dalam ranah sosial, sosok perempuan sering dipertentangkan dengan sosok lelaki. Perempuan yang lemah secara fisik kemudian digeneralisasi pada kategori moral, kultural dan intelektual. Budaya patriarki yang mengakar kuat telah menempatkan kaum perempuan pada titik terendah dalam kehidupan yang keberadaannya sangat jauh di bawah kungkungan laki-laki.

Menurut Harahap (2022) patriarki berasal dari kata *patriarkat*, yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya. Lebih lanjut, Harahap mengemukakan bahwa sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Irma et., al (2017) sebagaimana dikutip Harahap menegaskan bahwa laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.

Kondisi seperti inilah yang memicu lahirnya feminisme, sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Feminisme berasal dari bahasa latin, *femina* atau perempuan (Wirasandi, 2019). Menurut Sugihastuti (2016:18) feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Sugihastuti juga mengungkapkan bahwa feminisme merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan rumah tangga.

Feminisme sebagaimana dikemukakan Siscawati (2016) mencakup gagasan tentang pentingnya perempuan dan pengalaman perempuan, serta posisi dan pengalaman berbagai kelompok marginal yang terkait erat dengan isu gender dan seksualitas. Lebih lanjut, Siscawati menyebutkan bahwa feminisme juga mencakup sejarah Gerakan sosial yang bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus merupakan filsafat humanisme yang bekerja sebagai lensa untuk memahami kondisi perempuan, kelompok marginal dan manusia secara menyeluruh.

Secara historis, gerakan feminisme diperkirakan muncul di Eropa sejak akhir abad ke- 18, namun diakhiri abad ke-20 (Wirasandi, 2019). Budaya patriarki telah membuat perempuan diposisikan secara subordinat, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya dan disingkirkan dari ruang publik. Gagasan feminisme meyakini bahwa kondisi tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial, dan bukan takdir perempuan. Dengan slogan "*personal is political*" solidaritas diserukan, bahwa pengalaman pribadi seorang perempuan harus bisa diperjuangkan secara politik. Feminisme adalah sebuah kesadaran akan adanya berbagai ketidak-adilan yang dialami oleh perempuan juga upaya untuk mengeluarkan perempuan dari situasi tersebut dan mewujudkan kesetaraan juga keadilan gender di berbagai bidang kehidupan.

Gerakan feminisme atau biasa disebut dengan istilah emansipasi ini muncul di Indonesia pada tahun 1920-an. Gerakan ini masuk melalui perjuangan Raden Ajeng Kartini (1964) untuk membebaskan kaum perempuan dalam ketertindasan laki-laki (Chaerunnisa, 2019). Berbagai realitas ketimpangan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan pribumi membuat jiwa Kartini bergolak dan perlahan menumbuhkan kesadarannya untuk mulai berjuang agar bisa membebaskan kaum perempuan dari kondisi tersebut. Kartini menulis. Lewat tulisan-tulisannya, Kartini membuka mata dunia. Ia mengungkap berbagai bentuk ketidak-adilan yang dialami oleh perempuan dan menyampaikan pandangannya tentang bagaimana semestinya perempuan diperlakukan dan bersikap.

Menurut Rahayu (2003:291) surat-surat Kartini pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Belanda pada tahun 1911 di Semarang, Surabaya dan Den Haag atas prakarsa Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda, Mr. J.H. Abendanon. Armjin Pane menerjemahkannya dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pergolakan pergerakan kaum perempuan pada tahun 1920-an membuat penerbitan buku ini dilakukan secara berulang-ulang dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa daerah.

Tulisan-tulisan Kartini dalam bukunya telah menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia. Salah satunya adalah Suyatin. Pikiran-pikiran Kartini membuka kesadarannya untuk melihat persoalan perempuan. Di dalam dirinya kemudian terbangun solidaritas bahwa ia, Kartini, dan perempuan lainnya sama-sama menderita karena dilahirkan sebagai perempuan. Kartini baginya adalah inspirator yang mendorongnya berjuang di medan persoalan perempuan. Kelak Suyatin menjadi salah satu pemrakarsa Kongres Perempuan Indonesia I 1928, pendiri, dan ketua Perwari Pusat (Rahayu, 2003:300).

Berbeda halnya dengan di Sulawesi Selatan, ada berbagai pandangan terkait masyarakat Bugis yang merupakan salah satu suku terbesar di wilayah ini. Menurut Mahmud (2014), pada awal sejarah Bugis, perempuan dikatakan memiliki status sosial yang tinggi. Lebih lanjut, Mahmud mengemukakan bahwa Baso dan Idrus (2002:199) telah mencatat bahwa sebagian dari penguasa pertama, yang turun ke bumi dan status superiornya diakui, sebagian adalah perempuan. Rahman (2008: 3) menyatakan bahwa:

Orang-orang Bugis secara tradisional memiliki sistem pemerintahan yang demokratis dengan prinsip-prinsip kerakyatan yang sangat kental. Dalam berbagai penelitiannya, Zainal Abidin, antara lain menemukan bahwa satu-satunya bentuk pemerintahan tradisional di dunia yang berbentuk kerajaan tapi memiliki prinsip-prinsip demokrasi adalah orang Bugis. Raja tidak mesti dipilih dengan sistem pewarisan keturunan, tetapi dipilih oleh perwakilan rakyat (dewan adat), mengenal sistem voting, dan bahkan raja pun bisa diturunkan secara paksa oleh rakyatnya apabila melanggar amanat rakyat"

Hampir seluruh peneliti antara lain Pelras (2006) mengatakan bahwa bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di Sulawesi Selatan bersifat bilateral dimana proses pengambilan keputusan dan hubungan-hubungan gender serta relasi yang terbangun antara perempuan dan laki-laki didasarkan kompetensi yang dimiliki tanpa mempedulikan ia laki-laki atau perempuan. Dalam sejarah dan kebudayaan Sulawesi Selatan, perempuan Bugis tidak terkungkung dalam rumah tangga yang berada secara subordinasi dari laki-laki tapi dapat menjadi mahluk publik yang biasa memimpin, menjadi raja bukan saja secara simbolik tapi terlibat secara politik dan sosial. Perempuan-perempuan duduk bersama laki-laki dalam membicarakan masalah, dan pendapatnya dapat dijadikan sebagai keputusan. Ini yang membuat para peneliti asing heran dan takjub.

Crawfurd dalam Rahman (2018:4) mengemukakan bahwa:

"Perempuan dimintai pendapat oleh laki-laki dalam semua urusan pemerintahan, dan kerap kali diangkat menjadi raja. Padahal pengangkatan raja dilakukan lewat proses pemilihan. Pada acara-acara kerajaan, perempuan juga hadir di tengah kaum pria, duduk dalam sidang yang membahas masalah-masalah kenegaraan bahkan berhak memberi pertimbangan"

Hal yang sama juga disampaikan oleh Brooke (dalam Rahman, 2018:4) yang menyatakan ketakjubannya terhadap perempuan Bugis yang hidup melampaui apa yang ditemukannya dalam dunia lain, seperti yang dikatakannya:

"Semua jabatan kerajaan termasuk Arung Matoa, terbuka bagi perempuan, mereka benar-benar mengisi posisi penting dalam pemerintahan, empat dari enam pembesar utama Wajo adalah perempuan. Mereka tampil di muka umum layaknya kaum pria, menunggang kuda, memerintah dan juga mengunjungi orang asing tanpa harus sepengetahuan atau meminta izin suaminya"

Beberapa pandangan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa perempuan Bugis pada dasarnya mampu mengisi posisi dan melakukan peran yang selama ini didominasi oleh laki-laki, baik di wilayah publik maupun pada wilayah domestik. Sangat berbeda dengan sebagian kebudayaan lain yang ada di Indonesia yang menganut budaya patriarki. Sebuah budaya yang menempatkan perempuan sebagai *second sex*, yang keberadaannya hanya dipandang sebagai pelengkap. Selama ini perempuan hanya dipandang dari aspek fisiologisnya saja. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup besar pada posisi perempuan di tengah masyarakat.

Eksistensi perempuan dalam sejarah masyarakat Bugis menempatkan perempuan pada derajat yang mulia sebagai manusia seperti halnya laki-laki. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek tapi juga sebagai seseorang yang memiliki kehendak dan potensi. Perempuan diberikan kesempatan untuk memutuskan berbagai hal yang menyangkut diri dan kehidupannya. Sistem ini tumbuh dalam sejarah peradaban orang-orang Bugis. Hal itu dapat kita saksikan salah satunya dalam naskah La Galigo yang menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara bilateral, laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik.

La Galigo merupakan karya sastra terpanjang di dunia melebihi Mahabharata dan Ramayana dari India serta Odysei dari Yunani (Kern, 1939:1). Naskah tersebut pertama kali dikumpulkan oleh Colliq Pujie Arung Pancana pada abad ke-19 (Mahmud, 2014). Epos La Galigo mencapai lebih 300.000 baris panjangnya karena itu pada tahun 2011 UNESCO telah menetapkan La Galigo sebagai *Memory of the world*. Sebelum dikenal dalam bentuk lisan, genre sastra yang berciri epik panjang ini telah hidup dalam kurun waktu yang cukup panjang dengan cara penyampaian secara lisan (Akhmar dkk, 2014:20).

La Galigo menggambarkan dunia manusia Bugis pra Islam dan berkisah tentang manusia pertama di bumi (*mula tau*) juga keturunannya. La Galigo merupakan karya purba tapi isinya

memuat pesan-pesan yang sifatnya universal dan masih relevan dengan kondisi kekinian. Salah satu di antaranya hubungan antara laki-laki dan perempuan baik di dunia domestik maupun publik. Hubungan antara laki-laki dan perempuan terbangun secara setara, independen dan mengedepankan negosiasi tanpa ada satu pihak yang mendominasi yang lainnya. Apalagi memaksakan kehendak.

Naskah La Galigo pada umumnya menyebutkan nama baik perempuan maupun laki-laki, semuanya dilengkapi dengan peranan dan terlihat dengan jelas pada wilayah kerajaan masing-masing. Semuanya juga memiliki tugas yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, serta peranan masing-masing yang sangat menentukan (Nurnaningsih, 2003:320). Pada naskah La Galigo, perempuan tidak dipandang sebagai *second sex* karena perempuan dilibatkan bukan hanya pada wilayah domestik, juga publik.

La Galigo sangat penting dikaji untuk memahami relasi gender yang terjadi pada masyarakat Bugis. Sehingga bisa menjadi motivasi dan acuan bagi perempuan, khususnya perempuan Bugis untuk memahami peran-peran perempuan dalam kehidupan. Menurut Iswary (2010), penggunaan bahasa dalam sebuah masyarakat mencerminkan realitas sosial budaya masyarakat tersebut pada zamannya.

a. Pengertian Gender

Gender berasal dari bahasa Inggris “gender” berarti jenis kelamin (Echols dan Sadily, 1983:265). Helen dalam bukunya *Woman’s Studies Encyclopedia* mengungkapkan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sementara menurut Iswary (2009: 115) gender dapat diartikan sebagai peran dan tanggung jawab yang digagaskan secara sosial yang diberikan kepada kaum perempuan dan laki-laki dalam suatu kebudayaan atau lokasi tertentu yang didukung oleh struktur-struktur masyarakat.

Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat (Puspitawati, 2012: 32)

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat (Sri Sundari Sasongko, 2009: 6)

Secara kodrat memang diakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan dalam aspek biologis ini sering digunakan untuk menentukan relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Dimana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya (Istibsyaroh, 2004: 3).

Herien Puspitawati (2012: 32) menyebutkan definisi gender menurut berbagai pustaka adalah sebagai berikut:

- 1) Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.
- 2) Gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang

bagaimana artinya menjadi perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang zaman.

- 3) Gender diartikan sebagai suatu set hubungan yang nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal.
- 4) Gender bukan merupakan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas.
- 5) Pada tingkat ideologi, gender dihasilkan.
- 6) Gender bukan suatu kata benda “menjadi seseorang”, namun suatu “perlakuan”. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, dimana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya.
- 7) Teori gender merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatatan analisis material.

Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks secara utuh. Pengertian gender berbeda dengan pengertian jenis kelamin (seks). Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Pengertian seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan (Ade Kartini, 2019).

Perbedaan gender dan seks akan dipaparkan dalam tabel berikut:

Perbedaan gender dan *sex*, Sasongko (2019:7)

Gender	Seks/Jenis Kelamin
1. Bisa berubah	1. Tidak bisa berubah
2. Dapat dipertukarkan	2. Tidak dapat dipertukarkan
3. Tergantung musim	3. Berlaku sepanjang masa
4. Tergantung budaya masing-masing	4. Berlaku dimana saja
5. Bukan kodrat Tuhan/buatan Masyarakat	5. Kodrat (ciptaan Tuhan)

b. Teori Gender

Teori gender dapat dibagi menjadi dua, yaitu *nature* (alami) dan *nurture*. *Nature* dalam hal ini yang berhubungan dengan istilah gender merupakan pemetaan beban kerja berdasarkan faktor-faktor biologis perempuan dan laki-laki. Secara psikologis, umumnya masyarakat beranggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang memiliki hati lembut, baik, emosional, pasif dan submisif, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang perkasa, aktif, kuat dan agresif. Beberapa perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah pengurus rumah tangga yang terampil, cekatan mengurus anak dan suami, juga memasak untuk kebutuhan sehari-hari. Tugas laki-laki adalah mencari nafkah untuk kehidupan istri dan anak. Jadi teori *nature* adalah pandangan tentang pembagian tugas dan hakekat kehidupan perempuan dan laki-laki yang telah disetujui oleh masyarakat.

Konsep *nurture* (pemeliharaan, pengasuhan) merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan eksternal, seperti pola asuh, pendidikan, sosial-budaya, media masa, status sosial-ekonomi, agama dan sebagainya. Seorang individu akan berkembang menjadi orang dewasa yang baik, mandiri, cerdas, dan bertanggungjawab, apabila ia berada dalam lingkungan hidup yang mendukung perkembangan tersebut. Konsep ini dikemukakan oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, ibaratnya seperti papan putih yang masih bersih. Karena itulah, Ia percaya bahwa baik-buruknya perkembangan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor lingkungannya.

Faktor lingkungan adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Lingkungan mencakup lingkungan fisiologis, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosiokultural. Lingkungan sosiologis adalah segala kondisi dan materil yang ada didalam dan diluar tubuh. Lingkungan psikologis adalah segala stimulasi yang diterima individu sejak masa dalam kandungan hingga meninggal. Lingkungan sosiokultural adalah segala stimulasi interaksi dan kondisi eksternal dalam hubungannya dengan perlakuan atau karya orang lain (Henipuji, 2015:3).

Teori nurture adalah teori yang mengatakan adanya perbedaan wanita dan pria adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menimbulkan peran dan tugas yang berbeda antara pria dan wanita. Perbedaan itu membuat wanita selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, pergaulan dan masyarakat, berbangsa serta bernegara. Kontruksi sosial menempatkan wanita dan pria dalam perbedaan kelas/tingkatan.

Teori *equilibrium* adalah teori yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan gagasan dari teori *equilibrium* maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan secara seimbang. Hubungan keduanya tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi satu sama lain (komplementer).

Kata *equilibrium* sebenarnya diadopsi dari Bahasa latin "*aequilibrium*" yang berawalan *aequi* dan *libra* yang bermakna seimbang (*balance*), stabil, tidak bergerak, dan atau tidak berubah. Dalam Bahasa Indonesia *equilibrium* biasanya diterjemahkan sebagai keseimbangan atau kesetimbangan dan dalam Bahasa Arab dikenal dengan *tawazzun* (Husni, 2018: 5).

Edward Wilson (dalam Sasongko, 2009) mengungkapkan bahwa kesenjangan gender disebabkan oleh faktor *nurture* dan *nature*. Faktor *nurture* adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Faktor *nature* adalah perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan kodrat, sehingga harus diterima. Edward Wilson juga berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang dikenal dengan teori *equilibrium*.

R.H Tawney (dalam Sasongko, 2009) menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktur fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

c. Relasi Gender

Relasi gender merupakan konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang selalu berkembang (Nazaruddin: 1999). Pola relasi antara laki-laki dan perempuan realitasnya sama-sama mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender dan kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan penindasan gender. Pola relasi keduanya tidak pernah bersinggungan secara harmonis jika budaya patriarki masih menjustifikasi pemahaman pola relasi antara keduanya (Danik Fujiati, 2014).

Lebih lanjut Danik Fujiati (2014) mangatakan bahwa dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan perempuan terpenjara di ranah domestik dan laki-laki bergerak bebas di ranah publik. Implikasinya adalah, adanya ketidakseimbangan pola relasi dalam rumah tangga, seperti: 1) istri harus patuh dan menghormati suami, 2) segala kegiatan istri di luar harus seizin suami, dan 3) istri bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik. Oleh karena itu, istri secara sosial adalah warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Menurut Marx dan Engel, dalam rumah tangga, suami sebagai cerminan kaum borjuis dan istri sebagai kaum proletar (Collins Randal, 1987: 13).

Relasi kuasa gender tidak hanya terjadi dalam ranah domestik. Di ranah publik pun demikian. Dalam Permendagri No.144 Tahun 2014 pasal 40 ayat (3) ditegaskan tentang keharusan melibatkan perempuan dalam pembangunan desa, namun dalam tataran implementasi sering sulit terjadi, terutama terkait kepentingan perempuan dan anak-anak. Ketidaksiwaan negara dan kendala budaya pada akhirnya melumpuhkan daya kritis dan kekuatan perempuan dalam sejumlah aktivitas di ruang publik dan kuasa itu sangat berhubungan erat dengan proses pengambilan keputusan. Ketika kuasa tubuh dan pengetahuan dilumpuhkan, maka apapun yang disuarakan menjadi tidak bermakna.

Menurut Cantor dan Bernay dalam Ruspita (2012: 26) kekuasaan dari perspektif feminis merupakan pengaturan sosial dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan maskulinitas dan feminitas. Menurut Rosaldo (1974) kekuasaan dan nilai dapat diperoleh perempuan dalam peran domestik dan publik. Oleh karena itu kesempatan perempuan untuk memperoleh kekuasaan dapat dilakukan dengan memasuki wilayah laki-laki di ruang publik atau menerima legitimasi fungsi domestik dan menciptakan dunia mereka sendiri melalui alokasi penghasilan perempuan terhadap ekonomi rumah tangga.

Relasi kuasa perempuan diatur dalam Permendagri No. 144 Tahun 2014 pasal 40 ayat (3) tentang keharusan melibatkan perwakilan perempuan dalam setiap proses pembangunan desa. Dalam perspektif kekuasaan yang bersifat normatif, setidaknya ada pintu masuk bagi kelompok perempuan yang memainkan fungsi strategisnya untuk mempengaruhi berbagai kebijakan dan program pembangunan desa, karena secara nyata kekuasaan memang selalu bersifat menyebar dalam masyarakat. Akses kebijakan dan program bagi perempuan membutuhkan perjuangan yang sulit, jika tidak disertai keberanian bersuara kritis di ruang publik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010:4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan rancangan penelitian yang menggambarkan penelitian secara objektif yang dapat memberikan kejelasan secara sistematis mengenai objek penelitian (Prasuri et al, 2020). Metode penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang ilmiah, yang bertujuan untuk mendeskripsikan relasi gender perempuan dalam teks *La Galigo* berdasarkan Naskah NBG 188 Jilid 3 yang diterjemahkan oleh Nurhayati Rahman dan Tim yang diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2017.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yang berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik catat.

a. Penelitian kepustakaan

Menurut Mardialis (1999) penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

b. Teknik catat adalah teknik yang digunakan oleh penulis untuk mencatat data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan peneliti:

- a. Riset ke perpustakaan untuk mencari naskah yang berhubungan dengan eksistensi perempuan. Setelah itu naskah akan ditelaah dan akan dilakukan penelitian secara mendalam terhadap naskah tersebut yang berkenaan dengan relasi gender perempuan yang mencakup peran domestik dan publik.
- b. Mencatat dan mengklasifikasikan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah:

- a. Mengidentifikasi naskah untuk menemukan teks atau kalimat yang memuat relasi gender perempuan dalam teks La Galigo NBG 188 jilid 3.
- b. Mendeskripsikan data dan menerapkan teori *equilibrium* untuk mengetahui relasi gender perempuan dalam teks La Galigo NBG 188 jilid 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan beberapa teks yang memuat relasi gender perempuan dalam teks La Galigo jilid 3, baik di wilayah domestik maupun publik sebagai berikut:

1) Domestik

(Data 1)

“Kua adanna We datu Tompoq, “Madeceng sia le tapaenreq ri tojang lakko manurungnge paddai aseng mpekka duata, tapadarangngi awana langiq maneqna tana. Nasikadong mpali adanna Manurungnge mallaibini.” 2017:208

(“We Datu Tompoq berkata, “Sebaiknya kita upacara menaikkan pada ayunan emas wahai Manurung cucu-cucu kita, lalu kita undang sekolong langit dan sepetala bumi. Maka sepatkatlah Manurungnge suami istri.”)

Teks (Data 1) di atas menggambarkan We Datu Tompoq sedang berbicara kepada suaminya, Manurungnge terkait keinginannya untuk melaksanakan upacara menaikkan cucunya pada ayunan emas. Ia juga meminta agar orang-orang di langit dan di bumi diundang. Kutipan teks di atas menunjukkan bahwa perempuan memiliki kebebasan dan kesempatan untuk menyampaikan keinginan dan pendapat menyangkut kehidupan rumah tangganya.

(Data 2)

“Natalloq rio le Tompoq’e ri Busa Empong ronngang makkeda, We Tenriabeng akessingenna kuasengngi paddai aseng mpekka duakku, Bissu ri langiq pattelaarana, Daeng Manotteq pappasaweqna.” 2017:230

(“Alangkah senang Tompoqe ri Busa Empong dan berkata, “We Tenriabeng sebaiknya nama yang kuberikan kepada cucuku, nama gelarnya Bissu ri langiq, dan kuberi nama sapaan Daeng Mannoteq.”)

Teks (Data 2) di atas menggambarkan Tompoqe ri Busa Empong yang merasa senang dan memberikan nama juga gelar kepada cucunya. Kutipan teks di atas menunjukkan bahwa perempuan bebas mengekspresikan suasana hatinya dan memberikan nama juga gelar kepada keturunannya, tanpa meminta pertimbangan kepada laki-laki.

(Data 3)

“Terri makkeda We Datu Sengngeng, “Le Kuasengngi sebbu katikku orowane La Tenritappu Mase-masena allingerenna, le kuasengngi le makkunrai, We Tenriabeng akasirena ncajiangngengngi, le to tappali raung kajue mai ri Luwuq, to marolae tajjello jarung tenrisampureng ri Watang Mpareq.” 2017:234

(“We Datu Sengngeng menangis sambil berkata, “Kuberi nama anakku yang laki-laki, La Tenritappu Mase-masena orang tuanya, sedangkan yang perempuan kuberi nama, We Tenriabeng akasirena yang melahirkannya, orang yang bak dedaunan diterbangkan angin ke Luwuq, orang yang mengikut seperti jarum tak berbenang ke Watang Mpareq.”)

Teks (Data 3) di atas menggambarkan We Datu Sengngeng yang sedang menangis dan memberikan nama kepada kedua anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam kutipan teks di atas menunjukkan bahwa perempuan bebas mengekspresikan suasana hatinya dan memberikan nama kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan tanpa harus meminta persetujuan dari suaminya.

(Data 4)

“Pekkua na gi wukkaq timunna Anri datu puatta Mallaibine.” Mabbali ada Sawerigading, “Le makkada i, ajaq musompeq ri mabelae, temmuwisseng pa mawing tumea tenreng passoreng, le namabela ronnanng ri Sama le ri Maluku.” (2017:436)

(“Wahai adikku, bagaimana keputusan paduka suami-istri?” Sawerigading menjawab, demikian katanya, “Beliau berkata, ‘janganlah engkau pergi merantau ke tempat yang jauh, kau belum tahu bagaimana cara memberikan hadiah kepada perempuan, sedangkan negeri Sama dan Maluku amat jauh’.”

Teks (Data 4) di atas menggambarkan keputusan paduka suami istri yang tidak memberikan izin kepada Sawerigading untuk merantau ke daerah yang jauh. Dalam kutipan teks di atas memperlihatkan bahwa perempuan juga memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait kehidupan anaknya.

2) Publik

(Data 5)

“Nasitunrengeng dua makkeda Manurungnge mallaibine, “Le alingkajo to Senrijawa maneng ko mennang sining liseqna le langkane, accinaga ko ada dewata.” 2017:168

(“Manurungnge bersama permaisuri bersamaan berkata, “Hai, kalian para penghuni istana segeralah berpakaian orang Senrijawa, lantunkanlah nyanyian para Dewa.”)

Teks (Data 5) di atas menggambarkan Manurungnge dan permaisuri yang sedang memberikan perintah kepada penghuni istana. Dalam kutipan teks di atas memperlihatkan bahwa perempuan, dalam hal ini Permaisuri Manurungnge juga bisa memberikan perintah kepada penghuni istana.

(Data 6)

“Kua adanna We Datu Tompoq, “Pada kua I ritu manaiq ri Botting Langiq, le riparanruq lajuq tinawu sesumangeqna, bissu ri laleng mpettang areq I ritu We Abeng.” 2017:182

(“We Datu Tompoq berkata, “Semuanya di sana di Botting Langiq, tersimpan ari-ari pada kelapa pembawa jiwa semangatnya, karena We Abeng telah menjadi Bissu sejak dalam kandungan.”)

Teks (Data 6) di atas menggambarkan sosok We Tenriabeng yang sudah mendapatkan kesempatan menjadi bissu sejak ia masih di dalam kandungan. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga diberikan kesempatan untuk mengisi posisi-posisi strategis dan melakukan peran-peran yang tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan domestik.

(Data 7)

“Kua adanna manurungnge, appangara o We Lele Ellung, We Saung Nriug, narilekkekang ina nyumpareng pattuppu batu.” (2017:188)

(“Manurungge berkata, demikian katanya, We Lele Ellung dan We Saung Nriug, perintahkanlah untuk menjemput inang pengasuh dari kerajaan.”)

Teks (Data 7) di atas menggambarkan Manurungge memberikan perintah langsung kepada , We Lele Ellung dan We Saung Nriug, untuk menjemput inang pengasuh, sebuah pekerjaan yang biasanya ditugaskan kepada laki-laki. Kutipan teks di atas menunjukkan bahwa perempuan juga diberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.

(Data 8)

“*Nasitunrengeng dua makkeda Datu Patotoq Mallaibine, “Appangro Wi Ati Langiq patarakkaq i mai naereq ri langkanae Puang Matoa ri Botting Langiq,patarakkaq passakke kang ngi paraluq-kaluq gauq dewata to rilangiqna Batara Guru mallaibine.”* (2017:264)

(“Datu Patotoqe bersama permaisuri bersamaan berkata, “We Ati Langiq, perintahkanlah memanggil naik ke sini di istana Puang Matoa di Botting Langiq agar datang ke istana menyempurnakan adat dewa langit untuk Batara Guru suami istri.”)

Teks (Data 8) di atas menggambarkan Datu Patotoqe dan permaisuri yang sedang memberikan perintah. Dalam kutipan teks di atas memperlihatkan bahwa perempuan, dalam hal ini permaisuri Datu Patotoqe juga bisa memberikan perintah sebagaimana yang dilakukan laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, temuan menunjukkan bahwa dalam teks La Galigo NBG 188 jilid 3 relasi gender perempuan terbangun setara. Perempuan tidak hanya dilibatkan dalam urusan domestik, tetapi juga publik. Hal-hal yang umumnya dilakukan laki-laki juga dilakukan oleh perempuan. Misalnya, perempuan bisa menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya. Perempuan juga bisa memberikan perintah sebagaimana halnya dengan laki-laki dan diberikan kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Berbagai hal ini mengkonfirmasi bahwa perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki dan saling melengkapi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmar, Andi dkk. 2014. *Sastra (Islam) Bugis*. Makassar: Masagena Press.
- Baso, ZA& Idrus, NI 2002. *Aktivisme Perempuan Melawan Kekerasan di Sulawesi Selatan*. Di K. Robinson dan S. Bessel (eds.). *Perempuan di Indonesia: Gender, Kesetaraan, dan Pembangunan*. Singapura: Seng Lee Press Pte Ltd, hal 198-208.
- Bogdan dan Taylor, 2010. J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Chaerunnisa. 2019. *Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan; Episode Kelahiran Sawerigading*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Collins, Randall. 1987. *Sociology of Marriage and the Family: Gender, Love and Property*. Chicago: Nelson Hall.
- Echols, M. John & Hasan Sadily. 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Fujiati, Danik. 2014. Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis. *Jurnal Muwazah*. Vol.6, No. 1.
- Harahap, NHP. 2022. Perempuan dan Budaya Patriarki. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Saintek, Sosial dan Hukum*. Vol. 1.
- Henipuji. 2014. *Korelasi Antara Nature dan Nurture*. Blogspot: Henipuji13.
- Husni. 2018. *Konsep Equilibrium (Keseimbangan Sosial) Menurut Baqir Shadr*. Lhokseumawe: Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe.

- Irawan, Andi Muhammad. 2010. *Dimensi Kehidupan Perempuan; Refleksi Pengalaman dan Kajian tentang Perempuan dan Permasalahannya*. Makassar: LP3 KNPI Provinsi Sulsel.
- Irma, A., dan Hasanah, D. 2017. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Journal*, 7 (1), 71-80.
- Iswary, Ery. 2009. Simbolisme Jender dalam Folklor Makassar (Pendekatan Antropologi Linguistik). *Linguistik Indonesia*. Tahun ke 27 Nomor 1, February 2009.
- Iswary, Ery. 2010. *Perempuan Makassar; Relasi Gender dalam Folklor*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kartini, Ade, Asep Maulana 2019. "Redefenisi Gender dan Seks". *Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*. Vol. 12, No. 2.
- Kuswarini, Prasuri, Muhammad Hasyim, M., Chotimah, Irma N.H. 2020. Othering The Self as AForm of Mimicry in The English Translation of Hirata's Laskar Pelangi. *Journal of Critical Reviews*. Vol.7, Issue 19, 1286-1295.
- Mahmud, Murni. 2014. Menjelajahi Peran Gender dalam Cerita I Lagaligo. *Sosiohumaniora*, Volume 16. No.1.
- Mardialis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurnaningsih. 2003. *Perspektif Gender dalam Naskah Galigo* dalam buku *La Galigo Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Makassar: diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi La Galigo, Divisi Ilmu Sosial dan Humaniora, Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan forum Jakarta-Paris.
- Puspitawati, Herien. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor: PT IPB Press.
- Rahayu, Ruth Indiah. 2003. *Panggil Aku Kartini Saja*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Rahman, Nurhayati. 2008. *Retna Kencana Colliq Pujie Arung Pancana Toa 1812-1876. Intelektual Penggerak Zaman*. Makassar: La Galigo Press.
- Sasongko, Sri Sundari. 2009. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan BKKBN.
- Siscawati, Mia. 2016. Menelusuri Perkembangan Pedagogi Feminismedi Perguruan Tinggi: Pembelajaran di Program Studi Kajian Gender UI. *Jurnal Perempuan*. Vol. 21. No. 3.
- Sugihastuti, & Septiawan. 2016. *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwarno., Syah, Pairul., Wibisono, Damar. 2022. Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saiabatin Marga Legun, Di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. *Sosiologi: Jurnal Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*. Vol. 24. No. 1.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina.
- Wirasandi. 2019. *Wanita dalam Pendekatan Feminisme*. *Journal Ilmiah Rinjani*. Universitas Gunung Rinjani. Vol. 7. No.2.